

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang telah dilakukan oleh Bm Van Wyk (2013) adalah *“The Internal Auditor’s Responsibility to Detect Financial Statement Fraud”*. Pelaporan hasil keuangan organisasi merupakan tanggung jawab pengelolaan organisasi itu. Namun, nilai bisa ditambahkan ke keuangan laporan audit atas laporan keuangan tersebut dan pendapatnya diungkapkan oleh auditor eksternal. Selanjutnya ada harapan dari pihak pengguna laporan keuangan yang juga bertanggung jawab atas auditor mendeteksi kecurangan dan lebih spesifik lagi kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut dinyatakan dalam asosiasi penguji penipuan bersertifikat 2010 melapor kepada bangsa bahwa adalah pelaku tingkat tinggi yang menyebabkan kerusakan terbesar pada organisasinya. Itu biaya yang timbul dari kecurangan laporan keuangan yang ditemukan lebih dari tiga kali lebih tinggi dari biaya yang timbul akibat kecurangan yang dilakukan oleh manajer tingkat rendah dan sembilan kali lebih banyak daripada biaya yang terlibat dalam kecurangan karyawan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengapa auditor tidak mendeteksi kecurangan pertanyaan kecurangan secara merata. Profesi audit eksternal telah merumuskan yang spesifik standar yang menangani tanggung jawab auditor eksternal telah merumuskan yang spesifik standar yang menangani tanggung jawab auditor eksternal sehubungan dengan deteksi kecurangan selama audit laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kecukupan standar auditor internal dalam hal penyediaan bimbingan kepada auditor internal dalam hal mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menyoroti kurangnya panduan dalam standar audit internal mengenai tanggung jawab auditor internal yang berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan. Yang utama, baik arahan dan panduannya mengacu pada penipuan secara umum namun tidak khususnya untuk kecurangan laporan keuangan dan oleh karena itu auditor internal profesional dipaksa untuk mencari panduan di luar profesional dipaksa

untuk mencari panduan di luar standar audit internal mengenai deteksi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Putu Septiani Putri, Gede Juliarsa di tahun 2014 tentang kualitas audit yang berjudul “Pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor pada kualitas audit”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa daftar nama Kantor Akuntan Publik dan data primer berupa jawaban-jawaban responden dari pengumpulan data kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling* dalam penentuan sampel dan ada 36 sampel yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk teknik analisis datanya, dimana hasil penelitian menunjukkan variabel independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Secara parsial hanya tingkat pendidikan dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ketiga “*The Role Auditors in Preventing, Detecting, and Reporting Fraud: The Case of the United Arab Emirates(UAE)*” dilakukan oleh Halbouni 2015. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi auditor internal dan eksternal mengenai tanggung jawab mereka berkaitan dengan mencegah, mendeteksi, dan melaporkan penipuan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi prosedur yang auditor internal dan eksternal ikuti untuk mendeteksi fraud selama audit. Penelitian ini memiliki survey dari 53 auditor di Uni Emirat Arab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal terutama bertanggung jawab untuk mengidentifikasi insiden penipuan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prosedur diikuti oleh auditor eksternal yang sedikit lebih ketat daripada yang diikuti auditor internal. Kontribusi utama adalah bahwa auditor internal terutama bertanggung jawab untuk mengidentifikasi penipuan dan akibatnya lebih peduli tentang pelaporan insiden yang terkait dengan penipuan. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris untuk

gagasan bahwa auditor eksternal harus meningkatkan sejauh mana mereka berusaha untuk mendeteksi dan melaporkan insiden penipuan juga.

Penelitian keempat dilakukan oleh etana (2016) “ *The Role of Internal Audit in Detecting Fraud: The Case of Ethiopian Budgetary Public Sectors*”. Audit internal penting sebagai mekanisme jaminan internal yang penting dalam mengendalikan penipuan dalam anggaran sektor public. Selain itu, membantu organisasi pemerintah untuk mencapai akuntabilitas dan integritas, meningkatkan pelaksanaan program pemerintah dan mengembangkan kepercayaan di antara warga negara dan pemangku kepentingan serta untuk menawarkan risiko dari salah urus dana masyarakat. Ruang lingkup penelitian ini meliputi peran audit internal di Federal Ministries dan Perguruan pemerintah untuk melawan penipuan. Penelitian ini menggunakan survei cross sectional untuk menyelidiki peran audit internal dan statisti deskriptif digunakan untuk menganalisis dari data survei. Penelitian ini menguji peran audit internal deteksi dan pencegahan penipuan di Ethiopia sektor publik anggaran. Survei menemukan topi ada auditor cukup kompetensi dan independensi masalah terhadap kegunaan kerja audit internal untuk mendeteksi dan mencegah penipuan. Hal ini juga menentukan penilaian risiko audit internal yang memberikan kontribusi dalam deteksi dan pencegahan penipuan. Studi ini menyimpulkan bahwa Audit Internal Publik anggaran sektor kendur kompetensi dan independensi yang cukup untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, risiko penipuan penilaian tidak dilakukan yang mendukung audit internal untuk mengontrol penipuan. Akibatnya, peran audit internal dalam pencegahan penipuan dan deteksi minor.

Penelitian kelima dilakukan oleh Miftakhur Rizki Zainiah dan Sutjipto Ngumar pada tahun 2017 tentang kualitas audit yang berjudul “pengaruh independensi, kompetensi, *due professional care*, akuntabilitas, objektivitas, dan etika profesi pada kualitas audit”. Responden penelitian dalam penelitian ini adalah staf auditor dengan jabatan junior, senior dan supervisor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. Sampel yang digunakan sebanyak 10 Kantor Akuntan Publik yang diwakilkan oleh 32 staf auditor, yang diperoleh menggunakan metode *simple random sampling*. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada

responden di awal bulan Desember 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : (a) independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini berarti semakin independen seorang auditor maka semakin baik kualitas auditnya; (b) kompetensi tidak berpengaruh positif, hal ini berarti semakin kompetensi seorang auditor maka semakin baik kualitas auditnya (e) objektivitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, hal ini berarti auditor tidak dapat dikatakan berkualitas baik apabila tidak bertindak secara objektif berdasarkan bukti-butki otentik dari fakta yang ada yang diperolehnya. Peneliti menyarankan untuk penelitian di masa mendatang untuk menambah lebih banyak variabel, melakukan observasi lebih mendalam seperti ditambahkan metode wawancara dan memperluas populasi.

Penelitian keenam dilakukan oleh Oktavianus Kristianto, Suwardi Bambang Hermanto pada tahun 2017 tentang kualitas audit yang berjudul “pengaruh profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit” Penelitian ini menggunakan data primer, yang menggunakan metode survey dengan teknik *purposive sampling* terhadap 65 responden dari 15 KAP yang berada di Surabaya terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian regresi linier berganda menunjukkan bahwa profesionalisme dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan independensi auditor tidak berpengaruh dengan R^2 sebesar 56,3%, sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh meilina safitri di tahun 2017 tentang kualitas audit yang berjudul “Pengaruh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, objektivitas, pengalaman kerja, integritas dan motivasi terhadap kualitas audit” Sampel dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di inspektorat kabupaten/kota di Riau, tepatnya di Bengkalis, Kuantan Singingi, dan Pekanbaru. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda menggunakan SPSS versi 21. Data yang digunakan adalah data primer menggunakan kuesioner. Teknik analisis digunakan untuk menguji hipotesis adalah random sampling. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang manajemen keuangan, pengalaman kerja, integritas dan motivasi tidak terpengaruh kualitas audit. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa obyektivitas mempengaruhi kualitas audit.

Hasil pengujian diperoleh nilai R² sebesar 0,602 yang berarti 60,2% variabel yang mempengaruhi kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya 39,8% dijelaskan oleh variabel di luar model. Untuk penelitian masa depan, saya sarankan untuk memperluas cakupan area survei dan menambahkan lebih banyak variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Widya Arisza Septyaningtyas di tahun 2017 tentang kualitas audit yang berjudul “Pengaruh integritas, motivasi, objektivitas, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit” Penelitian dilakukan di Inspektorat Kabupaten / Kota di Provinsi Riau, yang berjumlah 13 inspektorat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan kuesioner sebagai instrumen. Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah sampling acak. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 responden. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21.0 untuk Windows sebagai program perangkat lunak pengolah data. Hasil uji hipotesis menggunakan statistik t-test menunjukkan nilai signifikan variabel integritas $0,302 > 0,05$, yang berarti bahwa H1 ditolak, variabel motivasi $0,869 > 0,05$, yang berarti bahwa H2 ditolak, variabel obyektivitas $0,00 < 0,05$, yang berarti H3 diterima, dan variabel pengalaman kerja $0,797 > 0,05$, yang berarti H4 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas, motivasi, dan pengalaman kerja tidak berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan, variabel obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Audit

Auditing yaitu sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2016:10).

Efendi dalam Riza (2012) audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses, kualitas hasil, dan tindak lanjut hasil.

Randal J.Elder, Mark S. Beasley, Alvin A.Arens (2012:4) “*Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*” Artinya *auditing* adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai berbagai kejadian ekonomi (informasi) guna menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi (informasi) dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen.

Mulyadi (2013:9), audit “Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai perntaraan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dibidang auditing, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *auditing* adalah suatu proses sistematis yang dilakukan secara independen untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen,serta mengkomunikasikan hasilnya tentang pendapatnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntan publik bisa mempunyai peran penting dalam menekan resiko informasi, yakni dengan memberikan jasa audit atas laporan keuangan entitas.

Dalam suatu audit, akuntan publik berupaya (melalui prosedur audit atau pengumpulan bukti audit) memperoleh asurans yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan yang diauditnya, bebas dari salah saji *material*, baik yang disebabkan oleh kekeliruan/kesalahan (*error*) maupun manipulasi/kecurangan (*fraud*). (Tuanakotta, 2015)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan sebagai berikut:

“Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.”

Namun adanya konflik kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan, menuntut akuntan publik untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien.

2.2.2. Teori Pengukuran (*Measurement Theory*)

Menurut Campbell, orang yang pertama menangani masalah pengukuran, definisi pengukuran adalah:

“The assignment of numerals to represent properties of material systems other than numbers in virtue of the laws governing these properties” yang berarti “penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat ini”.

Sedangkan menurut Stevens seorang ahli teori pengukuran ilmu sosial, pengukuran disebut sebagai:

“assignment of numerals to objects or events according to the rules” yang berarti penentuan angka-angka yang ada kaitannya dengan objek-objek ataupun peristiwa-peristiwa sesuai dengan peraturan.

Sedangkan menurut Suwardjono (2010):

“Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut konsep. Atribut adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut”

Dengan demikian pengukuran adalah penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum atau peraturan yang mengatur sifat-sifat tersebut. Sedangkan kaitannya dengan pertimbangan tingkat materialitas adalah dalam proses awal audit untuk menentukan batas awal salah saji yang material bagi perusahaan, diperlukannya pengukuran tingkat materialitas yang sesuai dengan sifat-sifat atau ciri-ciri yang merepresentasikan dari objek-objek tertentu sesuai dengan peraturan atau hukum dan standar yang mengatur sifat-sifat tersebut.

2.2.3. Teori Auditing

Menurut Arens, Elder dan Beasley dalam buku berjudul *Auditing dan Jasa Assurance* (2011):

“Audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan

kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Mulyadi (2009):

“Auditing adalah suatu proses sistematis yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010):

“Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2007):

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Dengan demikian audit adalah satu proses untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi kegiatan dan kejadian ekonomi yang kemudian diolah menjadi satu laporan untuk yang berkepentingan. Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang kompeten dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

2.2.4. Standar Auditing

Standar Auditing merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pula pertimbangan atas kualitas

profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan serta bukti audit.

Standar auditing menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001) dalam SA seksi 150 berbeda dengan prosedur auditing, yaitu “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan. Sedangkan “standar” berkaitan dengan kriteria atau tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Sepuluh standar auditing yang disusun oleh *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* tahun 1947 menjadi pedoman utama yang kemudian diadaptasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak 1973 dan sekarang disebut Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (SA-IAI). Kesepuluh standar tersebut, sebagai berikut:

a) Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihateknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalisnya dalam cermat dan seksama.

b) Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan , asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- 2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.
- 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- 4) Standar Pelaporan

- 5) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 6) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- 7) Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecualidinyatakan lain dalam laporan audit.
- 8) Laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima.

Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan dan di kompilasi secara semestinya kedalam laporan keuangan. Jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan hal ini lebih tidak mungkin dilakukan, karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Disamping itu tidaklah mungkin seseorang menyatakan keakuratan laporan keuangan mengingat bahwa laporan keuangan sendiri berisi pendapat, estimasi dan pertimbangan dalam proses penyusunannya, yang seringkali hal tersebut tidak tepat akurat seratus persen.

Oleh karena itu, menurut *website* www.academia.edu dalam audit atas laporean keuangan, auditor memberikan keyakinan (*assurance*) sebagai berikut:

1. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasi.
2. Auditor telah memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.

Dengan demikian materialitas menjadi konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor seperti yang diungkapkan oleh Sukrisno Agoes (2007):

“Materialitas dan Risiko Audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2009): “Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat materialitas atas audit laporan keuangan sangat berpengaruh untuk menjadi landasan dasar terhadap penerapan standar auditing terutama standar penerapan dan standar pelaporan.

2.2.5. Konsep Materialitas

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional (professional judgment) dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (PSA No. 25, SA Seksi 312, Paragraf 10).

Mulyadi (2002) mendefinisikan materialitas sebagai berikut:

“Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.”

Definisi lain dari materialitas menurut Arens & Loebbecke (2003) dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf mendefinisikan materialitas sebagai berikut :

“Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional”

Kemudian Boynton, Johnson & Kell (2001) dalam bukunya mendefinisikan materialitas sebagai berikut:

“Besarnya suatu pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang, di luar keadaan di sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut.”

Berdasarkan definisi-definisi menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan materialitas merupakan besar dari salah saji atau jumlah nilai yang dihilangkan dari informasi akuntansi, dimana salah saji atau nilai tersebut dapat dikatakan material jika dapat mempengaruhi laporan keuangan.

Definisi tersebut membuat auditor mempertimbangkan, situasi yang berhubungan dengan entitas dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain atau investor yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan yang telah diaudit. Contohnya, dalam suatu jumlah material bagi laporan keuangan suatu entitas mungkin tidak material bagi laporan keuangan entitas lainnya karena setiap entitas memiliki ukuran atau sifat yang berbeda. Dan juga materialitas audit atas laporan keuangan dalam suatu entitas, mungkin akan berubah dari satu periode ke periode lainnya.

Haryono (2001) menerangkan ada 4 indikator dalam menentukan tingkat pertimbangan materialitas, yaitu :

1. Pertimbangan awal materialitas

Saat perencanaan audit, seorang auditor idealnya menentukan pertimbangan awal tingkat materialitas. Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pemakai. Pertimbangan awal ini didasarkan ada unsur pertimbangan profesionalisme auditor, dan masih dapat berubah jika saat audit ditemukan perkembangan yang baru. Sebagai contoh, entitas telah mendapat tambahan dana yang diperlukan untuk melangsungkan kegiatan usahanya yang dulu

diragukan oleh auditor saat audit direncanakan, dan hasil audit memberi penegasan bahwa kemampuan entitas untuk melunasi hutang jangka pendeknya telah berubah secara signifikan saat audit berlangsung.

Melihat keadaan tersebut, tingkat materialitas yang digunakan untuk mengevaluasi temuan audit dapat menjadi lebih tinggi daripada materialitas yang direncanakan. Selain itu, tujuan penetapan awal materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah maka lebih banyak bukti yang harus dikumpulkan daripada jumlah yang tinggi, begitu juga jika auditor menetapkan jumlah yang tinggi maka lebih sedikit bukti yang harus dikumpulkan. Dalam konsep materialitas dinyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan, artinya hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan.

2. Materialitas pada tingkat laporan keuangan

Materialitas laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Materialitas pada tingkat saldo rekening

Materialitas saldo rekening adalah minimum salah saji yang mungkin ada pada suatu rekening yang dipandang sebagai salah saji material yang masih bisa diterima.

4. Pengalokasian materialitas laporan keuangan ke rekening-rekening

Pengalokasian materialitas laporan keuangan ke masing-masing rekening diperoleh dari taksiran awal materialitas saat auditor melakukan perencanaan audit. Dalam melakukan pengalokasian auditor harus mempertimbangkan kemungkinan salah saji dalam rekening dan biaya yang mungkin diperlukan untuk memeriksa suatu rekening.

2.2.6. Kompetensi Auditor

Dalam Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan peltihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kemudian dalam standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Lee dan Stone (1995) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Adapun Dreyfus dan Dreyfus (1986), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seseorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “mengetahui sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”. Seperti misalnya dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pernyataan yang bersifat intuitif.

Kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Jadi makna yang terkandung dalam pengertian tersebut adalah, pertama, karakteristik dasar kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan. Kedua, hubungan kausal berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat). Ketiga, kriteria yang dijadikan acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan terstandar. Kompetensi auditor untuk menemukan kemungkinan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien merupakan konstruk dan tidak bisa diamati secara langsung karena itu diperlukan indikator untuk mengukurnya, mencakup: perencanaan, pengetahuan, pengalaman, dan supervisi. (Kusumawaty, *et al*, 2016)

Indikator kompetensi auditor dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Reni (2010) dalam Yusuf (2014) menunjukkan bahwa indikator kompetensi auditor terdiri atas:

- a. Komponen pengetahuan yang meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta dan prosedur-prosedur.
- b. Memiliki kompetensi lain seperti kemampuan berkomunikasi, kreatifitas, kerjasama dengan orang lain.
- c. Keahlian menyangkut objek pemeriksaan yaitu dengan membandingkan objek yang diamati dengan standar yang berlaku dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan.
- d. Keahlian yang menyangkut teknik atau cara melakukan pemeriksaan agar memperoleh informasi yang maksimal baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam waktu yang terbatas.
- e. Keahlian dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan.melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP).

2.2.7. Independensi Auditor

Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Arens et al (2008:111), independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi sangat penting bagi auditor untuk dijaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut Halim (2008:46), independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditee-nya. Independensi menurut Wirakusumah dan Agoes (2003 : 8) merupakan pandangan yang tidak berprasangka dan tidak

memihak dalam melakukan test-test audit, evaluasi dan hasil-hasilnya, dan penerbitan laporan, dan merupakan alasan utama kepercayaan masyarakat.

Menurut Halim (2008:46), independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditee-nya. Independensi menurut Wirakusumah dan Agoes (2003 : 8) merupakan pandangan yang tidak berprasangka dan tidak memihak dalam melakukan test-test audit, evaluasi dan hasil-hasilnya, dan penerbitan laporan, dan merupakan alasan utama kepercayaan masyarakat

Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Independensi dalam penampilan akuntan publik dianggap rusak jika ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau hubungan yang mungkin mengkompromikan independensinya. Menurut Ruchjat Kosasih (2000:47-48) ada empat jenis risiko yang dapat merusak independensi akuntan publik , yaitu :

- a) Self interest risk, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari keterlibatan keuangan klien.
- b) Self review risk, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan.
- c) Advocacy risk, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien.

- d) Client influence risk, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan (familiarity) yang berlebihan dengan klien.

Arens (2003:83) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek yaitu:

- a) Independensi in Fact (Independensi dalam fakta)

Independensi dalam fakta (independen in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias dan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

- b) Independensi in Appearance (Independensi dalam penampilan)

Merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor independen telah menjalankan audit secara independen dan objektif, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik secara maupun keseluruhan.

Di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), juga dijelaskan bahwa terdapat tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu:

- a) Gangguan Pribadi

Gangguan pribadi adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan auditor membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanya apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi antara lain:

1. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa. (Pernyataan no 10)

2. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau mendatar sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa. (Pernyataan no 11)
3. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
4. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
5. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/ atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.
6. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadiberat sebelah. (Pernyataan no 12)
7. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa. (Pernyataan no 13)
8. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa.
9. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
10. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan

pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa.

11. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau program yang diperiksa.
12. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan.

b) Gangguan Ekstern

Gangguan ekstern adalah gangguan yang berasal dari pihak ekstern yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaan secara independen dan objektif. Gangguan ekstern meliputi antara lain:

1. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup audit secara tidak semestinya. (Pernyataan no 14)
2. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur audit atau pemilihan sampel audit. (Pernyataan no 15)
3. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu audit.
4. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa.
5. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan.
6. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan. (Pernyataan no 16)
7. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria lainnya.
8. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksaan. (Pernyataan no 17).

c) Gangguan Organisasi

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.” (Pernyataan no 18).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Independensi auditor adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor memiliki tanggung jawab atas opini laporan keuangan yang telah diaudit terhadap pihak-pihak yang terkait atau pengguna laporan keuangan tersebut. Untuk menjaga independensinya, auditor dituntut untuk tidak mempunyai kepentingan khusus atau pribadi terhadap klien yang diauditnya.

2.2.8. Motivasi Auditor

Motivasi berarti menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi (Goleman 2001:514). Motivasi yang paling ampuh adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, Condry dan Chambers dalam Suryani dan Ika (2004).

Motivasi kerja adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu yang membuat orang bertindak atau berprilaku dalam cara-cara tertentu. Memotivasi orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada mereka dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa mereka sampai ke suatu tujuan. Bermotivasi adalah keinginan pergi ke suatu tempat berdasarkan keinginan sendiri atau terdorong oleh apa saja yang ada agar dapat pergi dengan sengaja dan untuk mencapai keberhasilan setelah tiba di sana (Michael Armstrong, 1994 dalam Sri lastanti, 2005)

Adapun motivasi pada seorang itu tergantung pada kekuatan dari motivasi itu sendiri, seberapa kuat motivasi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan

adalah sesuatu yang ingin dicapai yang berada di luar individu, sebagai suatu harapan untuk mendapat suatu penghargaan, suatu arah yang dikehendaki oleh motivasi. Reksohadiprodjo (1990) mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu kekuasaan dari dalam diri orang tersebut. Kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan kerja.

Menurut Suwandi (2005), dalam konteks organisasi, motivasi adalah pepaduan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan personil. Hal ini akan mencegah terjadinya ketegangan/konflik sehingga akan membawa pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Dalam penelitian ini, ingin dilihat apa yang dapat memotivasi auditor untuk mencapai tujuan dengan mematuhi standar yang ada. Dapat disimpulkan juga bahwa motivasi dapat membuat orang bertindak atau berperilaku untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai ke suatu tujuan

2.2.9. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai acuan untuk penelitian ini, terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti. Secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Hasil Penelitian Relevan

No.	Judul dan Pengarang	Metode	Hasil
1.	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam suatu Pengauditan Laporan Keuangan Anesia Putri Kinanti	Populasi: Kantor Akuntan Publik (KAP) di Malang tahun 2012 Sampel: 32 orang Data dan Sumber Data: Kuesioner, KAP di Malang Operasional Variabel:	H₁: Kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. H₂: Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

		Kompetensi (X_1), Independensi (X_2), Motivasi Auditor (X_3) dan Tingkat Materialitas (Y) Teknik Analisis: Analisis Regresi liner berganda	H₃: Motivasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2.	Pengaruh <i>Professional Judgment</i> Auditor, Independensi dan Pengalaman Kerja terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Audit Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali) Putu Indira Yunitasari, I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana	Populasi: BPKP Perwakilan Provinsi Bali Sampel: 62 Auditor Data dan Sumber Data: Primer dan Sekunder Operasional Variabel: <i>Professional Judgment</i> Auditor (X_1), Independensi (X_2), Pengalaman Kerja (X_3), dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y) Teknik Analisis: Analisis Koefisien Determinasi dan Analisis Regresi Linier Berganda	H₁: <i>Professional Judgment</i> Auditor berpengaruh secara Positif, artinya Semakin Tinggi (X_1) maka Semakin Tinggi pula Pertimbangan Tingkat Materialitas yang dihasilkan Auditor dalam Proses Audit laporan keuangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali. H₂: Independensi Auditor berpengaruh secara Positif, artinya Semakin Tinggi (X_2) maka Semakin Baik pula Pertimbangan Tingkat Materialitas yang dihasilkan Auditor dalam Proses Audit laporan keuangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali. H₃: Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh secara Positif, artinya Semakin Tinggi (X_3) maka Semakin Baik pula Pertimbangan Tingkat Materialitas yang dihasilkan Auditor dalam Proses Audit Laporan Keuangan pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali
3.	Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pendidikan Auditor, terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bali) Luh Putu Ekawati	Populasi: Auditor Kantor Akuntan Publik wilayah Bali yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik Sampel: <i>Convenience</i>	H₁: Profesionalisme Auditor berpengaruh Positif terhadap Tingkat Materialitas. H₂: Pengalaman Kerja berpengaruh Positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas H₃:

		<p><i>Sampling</i></p> <p>Data dan Sumber Data: Primer (Kuesioner) dan Sekunder (Nama-nama Kantor Akuntan Publik di wilayah Bali)</p> <p>Operasional Variabel: Profesionalisme (X_1), Pengalaman Kerja (X_2), Tingkat Pendidikan Auditor (X_3), dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	Tingkat Pendidikan Auditor berpengaruh Positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
4.	<p>Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, dan Etika Profesi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Laporan Keuangan Ajeng Kusumawati</p>	<p>Populasi: KAP di wilayah Malang</p> <p>Sampel: Auditor yang bekerja di KAP wilayah Malang</p> <p>Data dan Sumber Data: Primer (Kuesioner)</p> <p>Operasional Variabel: Profesionalisme Auditor (X_1), Kompetensi Auditor (X_2), Etika Profesi (X_3), dan Tingkat Materialitas Laporan Keuangan (Y)</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>H₁: Profesionalisme berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p> <p>H₂: Kompetensi berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p> <p>H₃: Etika Profesi berpengaruh signifikan Positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p>
5.	<p>Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman Auditor, dan Independensi terhadap Pertimbangan Tingkat</p>	<p>Populasi: Auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Riau</p> <p>Sampel:</p>	<p>H₁: Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p> <p>H₂:</p>

	<p>Materialitas Lia Edly Syaravina</p>	<p>104 Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau</p> <p>Data dan Sumber Data: Primer (Kuesioner)</p> <p>Operasional Variabel: Profesionalisme (X_1), Etika Profesi (X_2), Pengalaman Auditor (X_3), Independensi (X_4), dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Etika Profesi berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p> <p>H₃: Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p> <p>H₄: Independensi berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p>
6.	<p>Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Auditor dalam Pendeteksi Kekeliruan, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan dengan Etika Profesi sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat) Suci Oktavia</p>	<p>Populasi: Auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Sampel: 64 Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Data dan Sumber Data: Primer (Kuesioner)</p> <p>Operasional Variabel: Profesionalisme (X_1), Pengetahuan Auditor dalam Pendeteksi Kekeliruan (X_2), Independensi (X_3), Pengalaman Auditor (X_4), dan Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)</p> <p>Teknik Analisis: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>H₁: Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p> <p>H₂: Pengetahuan Auditor dalam Pendeteksi Kekeliruan berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p> <p>H₃: Independensi berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.</p> <p>H₄: Pengalaman Auditor berpengaruh signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas</p>

Sumber: data diolah oleh penulis (2019)

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Kompetensi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan peltihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kemudian dalam standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Dan seperti yang diuraikan oleh Arens, Elder dan Beasley dalam buku berjudul Auditing dan Jasa Assurance (2011) Audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Seperti definisi dari Mulyadi (2002) yang menyatakan materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Dalam penelitian Anesia Putri dan Ajeng Kusumawati juga menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki seorang auditor berpengaruh signifikan dalam menentukan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

2.3.2. Pengaruh Independensi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Seperti yang diuraikan oleh Arens, Elder dan Beasley dalam buku berjudul Auditing dan Jasa Assurance (2011) Audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Halim (2008:46), independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi

adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditee-nya.

Mulyadi (2002) juga mendefinisikan materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Dalam penelitian Anesia, Putu, Lia dan Suci juga menyatakan Independensi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi independensi, semakin tinggi pula kualitas pertimbangan tingkat materialitas yang ditentukan oleh auditor. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

2.3.3. Pengaruh Motivasi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Motivasi berarti menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi (Goleman 2001:514). Motivasi yang paling ampuh adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, Condry dan Chambers dalam Suryani dan Ika (2004).

Motivasi kerja adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. Memotivasi orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada mereka dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa mereka sampai ke suatu tujuan. Bermotivasi adalah keinginan pergi ke suatu tempat berdasarkan keinginan sendiri atau terdorong oleh apa saja yang ada agar dapat pergi dengan sengaja dan untuk mencapai keberhasilan setelah tiba di sana (Michael Armstrong, 1994 dalam Sri lastanti, 2005).

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kompetensi (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

H₂: Independensi (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

H₃: Motivasi Auditor (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut masih terjadi research gap yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian dan kurangnya penelitian terdahulu yang menunjang salah satu variabel independen yang digunakan dan juga sampel yang digunakan berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas.

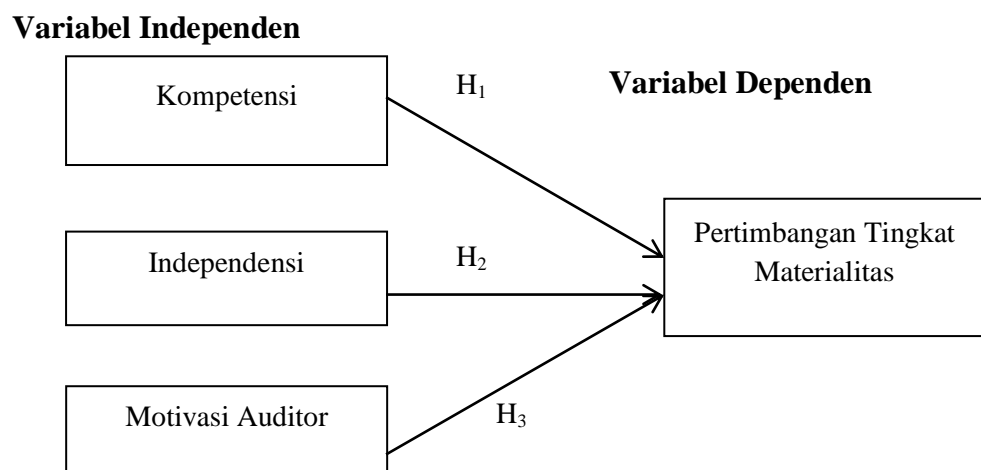
Untuk menunjang hasil pemeriksaan yang berkualitas, ada beberapa hal yang dapat menjadi pemicunya, antara lain kompetensi, independensi, dan motivasi yang dimiliki auditor. Keberhasilan dari memeriksa hasil laporan keuangan tentunya tidak terlepas dari hal tersebut. Kompetensi menunjukkan kemampuan teknis seperti pengetahuan serta keahlian yang dimiliki auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Independensi menunjukkan bahwa dalam memeriksa laporan keuangan auditor harus bebas dari pengaruh pihak lain dan tidak memihak kepada siapapun. Motivasi auditor menunjukkan keinginan atau pandangan pribadi auditor yang dapat meningkatkan semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan mencapai standar yang ada.

Menurut Arens, Elder dan Beasley dalam buku berjudul *Auditing dan Jasa Assurance* (2011) proses pengauditan haruslah dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Independensi sangatlah penting untuk dimiliki seorang auditor agar terciptanya suatu laporan keuangan yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh pihak luar yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Tetapi

selain independensi, auditor juga harus memiliki keandalan yang memadai atau kompetensi yang memadai untuk menghindari resiko audit atau salah saji pendeteksian dan pembuatan laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas auditor adalah motivasi dari seorang auditor itu sendiri. Menurut Goleman (2001: 13) dalam Anesia Putri (2012), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Berdasarkan dari uraian diatas serta penjelasan tentang latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: data diolah oleh penulis (2019)

2.6. Perumusan Hipotesis

Hipotesis dari penelitian yang akan disajikan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dalam Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan peltihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kemudian dalam standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Dan seperti yang diuraikan oleh Arens, Elder dan Beasley dalam buku berjudul *Auditing dan Jasa Assurance* (2011) Audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Seperti definisi dari Mulyadi (2002) yang menyatakan materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Dalam penelitian Anesia Putri dan Ajeng Kusumawati juga menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki seorang auditor berpengaruh signifikan dalam menentukan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁: Kompetensi (X₁) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

2. Pengaruh Independensi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Seperti yang diuraikan oleh Arens, Elder dan Beasley dalam buku berjudul *Auditing dan Jasa Assurance* (2011) Audit adalah pengumpulan data

dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh Halim (2008:46), independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditee-nya.

Mulyadi (2002) juga mendefinisikan materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Dalam penelitian Anesia, Putu, Lia dan Suci juga menyatakan Independensi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi independensi, semakin tinggi pula kualitas pertimbangan tingkat materialitas yang ditentukan oleh auditor. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂: Independensi (X₂) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

3. Pengaruh Motivasi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Motivasi berarti menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi (Goleman 2001:514). Motivasi yang paling ampuh adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, Condry dan Chambers dalam Suryani dan Ika (2004).

Motivasi kerja adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. Memotivasi orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada mereka dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa mereka

sampai ke suatu tujuan. Bermotivasi adalah keinginan pergi ke suatu tempat berdasarkan keinginan sendiri atau terdorong oleh apa saja yang ada agar dapat pergi dengan sengaja dan untuk mencapai keberhasilan setelah tiba di sana (Michael Armstrong, 1994 dalam Sri lastanti, 2005). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃: Motivasi Auditor (X₃) berpengaruh positif signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)